

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya, sumber penerimaan utama bagi negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional itu adalah pajak. Penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar dalam negeri yang terdapat di Anggaran Penerima dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penyebab keberhasilan tujuan pembangunan nasional berasal dari dana yang diperoleh dari sumber-sumber pajak. Fungsi pajak yang paling melekat dalam diri masyarakat merupakan sumber pembiayaan terbesar di suatu negara. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan yakni fungsi *budgetair*(Resmi, 2013: 3). Terbukti sekitar 70 persen pengeluaran Negara Indonesia dibiayai oleh pajak.

Penerimaan dari sektor pajak saat ini menjadi beban dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Terbukti dengan jumlah penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 penerimaan pajak di Negara Indonesia sebesar Rp 872,6 triliun, tahun 2011 sebesar 878,7 triliun, dan target APBN 2012 sebesar Rp 885,02 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut menunjukkan bahwa sumber utama penerimaan negara yang dapat diandalkan adalah penerimaan pajak(Herianto, 2007).

Sumber penerimaan pajak diantaranya dapat diperoleh dari pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan objek yang berupa seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara. Objek pajak bumi dan

bangunan berupa bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk dipantau (Karnanto, 2006:24). Sumber penerimaan utama bagi suatu negara dalam perkembangan ekonomi sekarang ini adalah pajak bumi dan bangunan yang diterima suatu daerah. Hal ini sesuai dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah dikelola oleh pemerintah daerah dan termasuk pajak daerah yang digunakan untuk kepentingan daerah kabupaten/kota berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010.

Pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu faktor penerimaan kas negara yang cukup besar. Terbukti dengan pernyataan Sutikno yang merupakan Kepala Seksi Dinas Penerimaan Daerah (Dispenda) wilayah Jawa Timur dalam salah satu media berita menuturkan bahwa “sektor-sektor penerimaan pajak daerah untuk pajak bumi dan bangunan telah mencapai target sebesar 84 persendian dalam realisasi penerimaannya yakni mencapai 68,24 persen atau sebesar Rp 553,97 miliar hingga tahun 2014. Namun, dalam realisasinya berbanding terbalik dengan sumber penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tuban yang mengalami penurunan. Hal ini terbukti dalam dua tahun terakhir yakni pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 3,31 persen lebih tinggi dibanding tahun 2012. Pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar Rp 81,8 miliar, sedangkan pada tahun 2012 hanya sebesar Rp 58,4 miliar. Sedangkan menurut Bupati Kabupaten Tuban yaitu Fathul Huda mengatakan dalam penyampaian jawaban pemerintah atas laporan badan anggaran dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tuban terhadap laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013 bahwa “adanya penurunan penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 23,3 milyar”. Penurunan dana tersebut disebabkan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Hal ini sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun anggaran 2013 sudah tidak menerima bagi hasil pajak baru PBB-P2. Selain itu, Bupati Huda juga mengatakan bahwa “hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 34,45 persen”. Terbukti pada tahun 2012 hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 14,4 milyar dan pada tahun 2013 hanya sebesar Rp 9,4 milyar.

Salah satu faktor penting untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut: (Nurmantu, 2003: 148) kepatuhan wajib pajak adalah “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Selain itu, Lubis (2011: 10) menjelaskan bahwa wajib pajak juga memiliki hak berupa mendapatkan informasi, butuh untuk didampingi dan didengar keluhannya, serta berhak membayar pajak tidak lebih dari yang dikenakan. Sehingga, menurut Mardiasmo (2011: 1) kepatuhan wajib pajak (*taxpayer compliance*) berkaitan dengan kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Hal inilah yang membuat dukungan dan partisipasi dari

masyarakat merupakan bentuk kepatuhan untuk membayar pajak yang sangat diharapkan oleh pemerintah.

Bentuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan. Faktor sikap berasal dari diri wajib pajak. Setiap wajib pajak memiliki sikap yang berbeda-beda, ada yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak sesuai waktu yang telah ditentukan dan ada pula yang kurang peduli akan kewajibannya tersebut. Namun, menurut Wahyu Utomo(2011)sikap wajib pajak sangat “dipengaruhi dengan niat dan lingkungan dimana wajib pajak berada”.

Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ini sangat mempengaruhi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi. Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya (Ramadiansyah, Nengah, & Dwiatmojo, 2014).

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam realisasinya ternyata pemungutan pajak masih cenderung sulit dilakukan oleh negara karena tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak masih cukup rendah(Amran, 2003). Sehingga, faktor lain yang sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya yakni pengetahuan perpajakan. Tanpa didukung oleh pengetahuan, wajib pajak orang pribadi akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, melakukan pengisian

SPT, dan melakukan pembayaran pajak(Siregar, Saryadi & Sari, 2012). Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan penting bagi wajib pajak untuk mengetahui jumlah pajak terutang yang seharusnya mereka bayarkan tepat waktu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu Utomo (2011). Hasil penelitian terdahulu mengatakan bahwa sikap wajib pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengambil topik “Pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi pengguna, antara lain:

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan banyak manfaat dari segi ilmu perpajakan, meliputi tata cara perpajakan di Negara Republik Indonesia yang berguna di masa yang akan datang.

b. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan program kerja dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Bagi Kalangan Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

d. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wacana dan referensi serta literatur di bidang perpajakan sehingga dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya yang terkait dan sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan pembahasan antara satu bab dengan bab yang lain yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Selain itu, berisi pula landasan teori yang berkaitan dengan Kepatuhan Perpajakan yang

mendasari penelitian ini, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrument penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi peneliti selanjutnya.